

ELITE GUS CILIK DALAM PAGUYUBAN PADANG SAMBIAN BERSATU

Ni Made Asri Wahyuni¹⁾, Bandiyah²⁾, Muhammad Ali Azhar³⁾

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana

Email : madeasri97@gmail.com¹⁾, dyah_3981@yahoo.co.id²⁾, aliazhar23mr@yahoo.co.id³⁾

ABSTRACT

The role of the Gus Cilik's Elite in the Padang Sambian Bersatu became interesting in this study by explaining the role of Elite Gus Cilik and Padang Sambian Bersatu in Pakraman Village of Padang Sambian. The theory used by the author owned Elite theory by Suzanne Keller. The method used in this research is descriptive qualitative, while data collection techniques are through observation, in-depth interviews and documentation. In this study concluded that Gus Cilik one of factor existence as a political elite will be the result of the support Paguyuban Sambian Bersatu is also influenced by his background as a traditional elite and local elite.

Key words: Gus Cilik, Padang Sambian Bersatu, Suzanne Keller

1. PENDAHULUAN

Masyarakat Desa *Pakraman* Padang Sambian memiliki sebuah paguyuban yang dinamakan Paguyuban Padang Sambian Bersatu. Paguyuban ini adalah perkumpulan organisasi masyarakat sipil yang anggotanya terdiri dari masyarakat Desa Padang Sambian. Fungsi terbentuknya adalah menjaga keamanan dan ketertiban desa. Adanya paguyuban ini tidak lepas dari kesepakatan pengurus adat serta masyarakat yang bersama-sama memiliki kepentingan untuk membangun Desa *Pakraman* Padang Sambian. Dasar hukum yang membentuk Padang Sambian Bersatu adalah *pararem* yang dinilai masyarakat lokal di sana mempunyai kekuatan yang lebih besar daripada *awig-awig*.

Keberadaan Paguyuban Padang Sambian Bersatu ini ternyata tidak hanya sebagai perisai dalam menjaga desa Padang Sambian tetapi juga ikut

berpengaruh dalam kontestasi politik lokal serta berafiliasi kuat dengan elite politik. Sejalan dengan perkembangannya paguyuban ini pernah terlibat pertikaian dengan salah satu ormas yang ada di Bali bernama Laskar Bali sejak kasus bentrok tersebut, nama Paguyuban Padang Sambian Bersatu semakin dikenal di kalangan masyarakat. Meskipun pernah terlibat pertikaian, Paguyuban Padang Sambian Bersatu tetap dianggap sebagai pelindung oleh penduduk Desa *Pakraman* Padang Sambian. Hal ini tentunya tidak terlepas dari pengaruh desa *pakraman* serta peran elite lokal politik di Desa *Pakraman* Padang Sambian.

Figur kepemimpinan elite lokal di desa ini sangat kuat, sosok ini bernama Anak Agung Ketut Semara Putra atau yang akrab dipanggil Gus Cilik (GC). Sosok GC dianggap oleh masyarakat desa sebagai seorang yang religius, memiliki kewibawaan

dan kekayaan. Melalui ketiga hal tersebut, GC menghantarkan menjadi Wakil Ketua DPRD Kota Denpasar periode 2014-2019. Sebelum memutuskan terjun ke dunia politik, GC juga sudah dikenal luas masyarakat desa sebagai elite tradisional yang memiliki kekuatan rohani dalam hal menyembuhkan penyakit melalui bantuan niskala. Pengalaman GC sebagai balian memberikan pengaruh kuat di masyarakat untuk mendukungnya dalam Pemilihan Legislatif (Pileg) pada tahun 2014.

Bahkan yang terbaru, jajaran Intelejen Keamanan (Intelkam) Polda Bali di Denpasar juga ikut bekerja sama dengan Paguyuban Padang Sambian Bersatu dalam terselenggaranya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Bali 2018. Merujuk pendapat dari Smith (1985) bahwa

2. KAJIAN PUSTAKA

Teori Elite

Istilah Elite dalam penelitian ini, ditujukan untuk pribadi yang dianggap mempunyai peranan atau kedudukan tinggi di tingkat lokal dan ada peranan dalam politik. Membahas mengenai elite, penulis menggunakan teori Suzanne Keller tentang elite. Peranan elite dalam kajian ini, akan penulis klasifikasikan ke dalam tiga teori elite menurut Suzanne Keller. Adapun penjelasan teori tersebut akan penulis jabarkan sebagai berikut :

A. Elite Tradisional

Penulis mengkaji beberapa pemikiran para ahli mengenai elite tradisional. Elite tradisional yang termasuk ke dalam kategori penulis pada penelitian

penyelenggaraan pemerintah dan kebijakan lokal yang demokratis seringkali ditandai dengan adanya penerapan kesetaraan peran politik dari warga negara dan para pemangku kepentingan serta penyelenggaraan kebijakan lokal yang responsif terhadap berbagai permasalahan di tingkat lokal . Melalui uraian diatas, maka dirasakan perlu untuk mengkaji sebuah penelitian tentang Peran Elite Gus Cilik Dalam Paguyuban Padang Sambian Bersatu termasuk di dalamnya menelusuri secara ilmiah individu dan kelompok yang menjadi basis kekuatan elite politik beserta pendukungnya dalam mempengaruhi masyarakat desa pakraman. Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian adalah Bagaimana Peran Elite Gus Cilik dalam Paguyuban Padang Sambian Bersatu ?

ini merujuk kepada seorang yang memiliki kekuatan magis dalam segi agama namun dihormati di lingkungan tempat tinggalnya. Dalam masyarakat Bali, kekuatan magis tersebut erat dikaitkan dengan profesi sebagai Balian yang mampu mengobati secara tradisional dengan bantuan ilmu kebatinan. Di tengah situasi modern saat ini, masyarakat Bali masih percaya dengan keahlian yang dimiliki oleh seorang balian dan menganggap permasalahan bisa diselesaikan dengan bantuan *Balian*. Keahlian dalam pengobatan ini tidak semua orang memilikinya, belum ada kajian yang pasti mengenai bagaimana orang-orang mendapatkan kemampuan untuk mengobati seperti Balian jika di situasi

modern, kita mungkin tidak asing dengan istilah dokter yang dipercaya mengobati pasien yang sakit. Namun berbeda jika dikaitkan dengan kondisi masyarakat yang masih menganut paham tradisional. Maka dari itu penulis mengelompokkannya menjadi elite tradisional. Selanjutnya, beberapa pendapat para ahli mengenai elite tradisional penulis jabarkan sebagai berikut :

Suzanne Keller berpendapat perihal elite tradisional bahwa elite ini dianggap strategis karena elite tetap bisa beradaptasi walau dengan situasi modern. Situasi ini secara tidak langsung membawa elite menjadi elite adaptasi yang mengembangkan alat untuk mencapai tujuan dengan memerhatikan problema eksternal seperti hubungan dengan dunia luar dan rencana untuk masa depan. Keller (1984) juga percaya bahwa masyarakat yang memiliki elite, lebih baik daripada masyarakat yang tidak memiliki elite.

Kharisma dan status yang tinggi dimiliki secara tradisi memungkinkan kelompok elite tradisional tampil sebagai pemimpin. Pemikiran lainnya mengenai elite tradisional dijelaskan menurut (Suryawan,2010:292) yang menguraikan sifat-sifat kepemimpinan tradisional juga sangat di dukung oleh tingkah laku bawahan yang masih mencerminkan tingkah laku emosional. Dalam tingkah laku ini, mereka banyak ditentukan oleh hubungan emosional terhadap pemimpin mereka berdasarkan tali ikatan agama, tradisi maupun kekerabatan. Akibatnya berbagai kelompok elite tradisional yang ada memiliki ikatan yang sangat kuat

terhadap pengikutnya. Penulis menggunakan pemikiran elite tradisional dari Keller guna mendukung penelitian penulis. Penulis yakin pemikiran Keller mengenai elite tradisional bisa menjadi pisau pembedah untuk menganalisis penelitian penulis. Beberapa poin mengenai elite tradisional oleh Keller yang penulis anggap mampu membantu penelitian penulis yakni pengaruh adat dan juga status bangsawan di masyarakat. Klasifikasi ini menurut penulis mampu menjelaskan permasalahan yang terjadi di lokasi penelitian penulis yang masih erat kaitannya dengan lingkungan pedesaan yang erat akan tradisi. Elite tradisional di sini memiliki pengaruh politik yang kuat walaupun di tengah situasi negara modern. Pemikiran Keller yang menjelaskan bahwa kemampuan elite tradisional untuk beradaptasi di tengah partisipasi politik dalam situasi modern ingin penulis gunakan sebagai acuan menjelaskan peranan elite sebagai sosok tradisional di lingkungan adat tempat tinggalnya sebelum nantinya mengalami perubahan kedudukan elite yang lebih tinggi.

B. Elite Lokal

Mengkaji mengenai persoalan elite lokal, sekaligus juga memberikan ruang bagi pembahasan mengenai peran elite dalam transisi demokrasi lokal. Konteks lokal dalam penelitian ini bisa dipahami sebagai salah satu faktor terjadinya tingkatan kekuasaan. Sebelum melaju ke arah tersebut, penulis ingin menegaskan bahwasanya elite lokal di kajian ini merupakan jabatan yang diperoleh seseorang melalui tingkatan elite

tradisional. Keterhubungan antara tradisional dan lokal bisa dirasakan jika suatu masyarakat memiliki kepentingan dalam kedua hal tersebut. Elite lokal yang penulis bahas dalam penelitian ini memiliki afiliasi yang kuat antara massa pendukungnya serta politik. Kemunculan fenomena elite lokal dalam suatu tatanan masyarakat tidak lepas melalui pengaruh pelaksanaan otonomi daerah.

Dalam banyak perspektif, dipahami bahwa elite lokal mempunyai peran yang cukup signifikan dalam mewujudkan pemerintahan yang demokratis dan mendorong demokratisasi di tingkat lokal. Elite lokal secara umum memiliki pengetahuan dan wawasan yang cukup luas dibanding dengan kebanyakan masyarakat. Namun peran strategis dari elit lokal untuk menjadi corong demokratisasi, menjadi sangat dilematis, ketika mereka berafiliasi dengan kepentingan-kepentingan politik yang ingin mendapatkan konstituen pemilu, contohnya dalam pemilihan umum kepala daerah langsung, demi kepentingan kelompok atau golongan. Kondisi ini sebenarnya bisa dianggap sebagai sesuatu yang wajar dan bentuk dari partisipasi elite lokal dalam berdemokrasi.

Keller (1995:31) memberikan pemikiran bahwa kepribadian elite merujuk ke minoritas seseorang yang diangkat untuk menjalankan fungsi sosial kepada suatu kolektifitas. Fungsi elite di dalam masyarakat bisa sebagai penengah kedua individu, individu dengan kelompok ketika sedang terjadi permasalahan. Kemampuan elite lokal dalam hal tersebut kemudian

berdampak pada adanya dua lapisan dalam masyarakat yakni, lapisan yang rendah dan lapisan yang tinggi yang di bagi menjadi dua, elite yang memerintah dan elite yang tidak memerintah.

Peran elite lokal dalam masyarakat sangat penting karena memiliki hubungan yang lebih dekat dengan masyarakat. Dalam penelitian ini elite lokal merupakan bagian dari dewan desa yang berhubungan langsung dengan kepentingan adat. Hal ini merupakan pihak yang membawahi sekaligus panutan bagi masyarakat di bawahnya. Peran elite masyarakat selain untuk program-program pembangunan daerah, juga bertugas mengayomi dan menjalin kerukunan antarkelompok masyarakat. Sebagai elite lokal, haruslah bersifat netral, karena tugas pokoknya sebagai tokoh masyarakat adalah melindungi warganya yang berbeda-beda dalam afiliasi politik. Dalam hal ini, elit lokal hendaknya berperan menjadi penyejuk dan pemersatu warganya yang tengah bersaing dalam kepentingan politik agar tetap rukun dan toleran .

Selain itu masyarakat Bali masih sangat menghormati elite lokal yang dianggap menjadi tokoh penting dalam suatu permasalahan. Terlebih jika sudah menyangkut mengenai permasalahan adat di sebuah desa. Sebelum menyelesaikannya melalui jalur hukum, terlebih dahulu masyarakat meminta pendapat dan bantuan kepada elite lokal untuk menyelesaikan suatu konflik yang terjadi di masyarakat. Oleh karenanya, penulis memiliki keyakinan untuk menggunakan teori elite dari Keller sebagai pisau

pembedah dalam analisis kajian penulis. Pemahaman ini mengantarkan kita pada kenyataan bahwa elite merupakan seseorang atau sekelompok orang yang mempunyai nilai lebih tertentu atau dengan kata lain dia memiliki keunggulan, di mana dengan keunggulan yang melekat pada dirinya itu, seseorang atau sekelompok orang dapat menjalankan peran yang menonjol dan berpengaruh pada struktur dan sistem kekuasaan tertentu. Sifat menonjol atau keunggulan yang melekat pada diri itulah yang mengantarkannya menempati posisi puncak dalam struktur kekuasaan.

C. Elite Politik

Kekuasaan politik yang dimiliki seorang elite memacu penulis untuk mengkaji mengenai perannya sebagai elite politik. Banyak pemikiran para ahli mengenai elite politik yang menjadikan kajian mengenai elite sangat menarik untuk dibahas. Elite politik dalam kajian ini memiliki kedudukan yang tinggi dalam suatu tatan politik di tingkatan daerah (lokal). Namun berbeda dengan elite lokal yang lebih menjerus ke masyarakat, dalam kajian ini penulis ingin menjelaskan melalui perspektif politik. Beberapa pemikiran yang muncul mengenai teori elite politik, yakni Keller berpendapat bahwa terdapat tiga pengertian mengenai elite politik : pertama, elite politik mencakup semua pemegang

Sering kali kata "elite politik" digaungkan ketika seorang politisi atau calon kandidat melakukan pidato serta debat untuk mendapatkan simpati rakyat. Dalam bidang politik, elite dibagi menjadi dua bagian diantaranya elite politik lokal

dan elite non politik lokal. Elite politik lokal merupakan seseorang yang memegang jabatan-jabatan politik baik di eksekutif maupun legislatif yang dipilih melalui pemilihan umum (Pemilu) dan dipilih dalam proses politik yang demokratis ditingkat lokal. Selain menduduki jabatan politik tinggi ditingkat lokal, mereka juga membuat dan menjalankan kebijakan politik di daerahnya, contohnya : gubernur, bupati, walikota, DPRD, dan pimpinan-pimpinan partai politik lokal. Sedangkan elite non politik lokal adalah individu yang memegang jabatan-jabatan yang strategis di tingkat organisasi dalam masyarakat dan mempunyai pengaruh untuk memerintah orang lain dalam lingkup masyarakat seperti contoh : elite keagamaan, elite organisasi kemasyarakatan, kepemudaan, profesi dan lain sebagainya (S.P Varma,2010:202).

Sebagai tokoh yang berpengaruh, elite dapat mendorong masyarakat menuju kepada arah untuk mewujudkan kepentingan, sehingga untuk mendukung penelitian ini menjadi lebih baik, penelitian menggunakan teori elite tradisional dari Suzanne Keller. Teori ini sangat mendukung penelitian penulis untuk membedah mengenai kasus fenomena elite yang berkuasa dalam politik lokal serta organisasi masyarakat di tingkat lokal. Poin yang menjadi alasan penulis menggunakan kajian teori dari Keller adalah pemegang kekuasaan dan jabatan politik. Kedua hal tersebut dimiliki oleh elite yang akan penulis kaji dan penulis percaya bisa mendukung penelitian penulis. Sebagai negara dengan paham demokrasi, tentu

keberadaan elite politik tidak bisa dihindari dari adanya proses sosial yang berkembang. Berjalannya proses itu, kaum elite pun menjadi semakin beragam dan lebih bersifat otonom sehingga konsep elite

Kajian Konseptual

Desa *Pakraman* dan Elite Paguyuban

Pemberian otonomi yang lebih besar kepada daerah telah terjadi untuk mempercepat proses demokratisasi di daerah. Hal tersebut tertuang dalam UU nomor 25 tahun 1999. Melalui pengaturan tersebut, pembahasan yang menyangkut otonomi tidak hanya membahas mengenai masalah administrasi semata, melainkan juga membahas masalah-masalah politik, seperti kewenangan yang lebih besar kepada daerah untuk mengatur keuangan otonomi daerahnya sendiri. Dampak dari adanya desentralisasi politik ini kemudian melahirkan politik lokal di mana daerah memiliki wewenangnya sendiri untuk melakukan kegiatan politik. Politik lokal dalam penelitian ini membahas mengenai interaksi serta mekanisme antar elite lokal yang ada di Bali dengan pemerintah daerah dalam hal ini adalah pemerintah desa.

Elite lokal di sini berperan sebagai lembaga institusi daerah yakni, DPRD serta ketua dari komunitas lokal yang memiliki peran penting dalam menyampaikan aspirasi masyarakat, sehingga kepentingan demokrasi dapat berjalan efektif dalam meningkatkan akuntabilitas pemerintah di tingkat daerah. Adanya perspektif politik di pemerintah daerah dengan elite lokal, menguatkan pandangan peneliti bahwa terdapat relasi kekuasaan antara

cenderung lebih menekankan kepada penguasa dan elite yang tidak berkuasa tergantung terhadap skala kepentingan yang dipegangnya.

pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah pusat kemudian melakukan alokasi kekuasaan kepada daerah sehingga sampai ke berbagai komunitas atau kelompok-kelompok kepentingan yang ada di daerah. Tidak menutup kemungkinan bahwa relasi kuasa hanya sampai di seputaran elite politik lokal saja sehingga komunitas hanya perlu menunggu perintah untuk bergerak.

Sejalan dengan hal tersebut adanya politik lokal juga membuka wewenang penuh kepada pemerintah lokal (desa) untuk menjalankan urusan internalnya. Berbagai daerah di Indonesia tentu memiliki kepentingan politik yang berbeda-beda dalam mengatur urusan politiknya sendiri. Terbitnya aturan daerah terkait kebijakan otonomi juga berimbas ke daerah Bali. Peraturan Daerah (Perda) nomor 3 tahun 2001 muncul sebagai dasar hukum bahwa desa adat (*pakraman*) di Bali diberikan wewenang penuh untuk menjalankan urusan internalnya dan menjadi dewan desa sebagai otoritas tertinggi (Nordholt, 2010, hal. 34). Desa *pakraman* atau desa adat adalah kesatuan tradisi dan tata pergaulan hidup masyarakat umat Hindu Bali secara turun temurun dalam ikatan kahyangan tiga yang mempunyai wilayah tertentu dan harta

kekayaan sendiri serta berhak mengurus rumah tangganya sendiri. (Sirtha, 2016 :13)

Hal ini menjadikan desa *pakraman* memiliki wewenang untuk mendapatkan profit agar desa bisa berkembang sebagaimana mestinya. Hampir seluruh masyarakat desa di Bali menganggap bahwa daerah mereka memiliki potensi pariwisata yang besar. Beberapa daerah di Bali membuat suatu keputusan menggunakan otonomi daerah mereka masing-masing guna melindungi dan memajukan pariwisata di daerah. Keputusan tersebut tentu ditetapkan oleh para elite lokal yang dipercaya oleh masyarakat setempat memiliki kemampuan dalam mengambil langkah suatu kebijakan. Elite lokal inilah yang nantinya akan memberikan dukungan terhadap setiap keadaan di daerah masing-masing.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-eksplanatif dalam menjelaskan elite GC dalam Paguyuban Padang Sambian Bersatu di Desa Pakraman Padang Sambian. Penulis menggunakan metode kualitatif dikarenakan penulis ingin mendapatkan data-data lisan dari perilaku orang-orang yang diamati. Di sisi lain, penulis ingin mendapatkan sejarah perkembangan kehidupan seorang elite serta sebuah paguyuban yang berhubungan langsung terhadap interaksi sosial maka penulis merasa sangat tepat menggunakan metode ini. Pendekatan penelitian ini dikatakan deskriptif-

Dalam skripsi ini penulis mencoba mengkaitkan bahwa peranan elite lokal sangat berpengaruh terhadap proses kebijakan yang terjadi dalam suatu daerah. Elite lokal bisa menjadi wali untuk desa agar desa *pakraman* bisa mendapat bantuan dana baik dari pemerintah daerah maupun pusat. Desa *pakraman* sudah pasti akan berurusan dengan adat yang mana juga mengurus kepentingan-kepentingan dalam hal beribadah. Tentu hal tersebut dilakukan oleh para dewan desa yang memiliki kuasa di tingkat lokal (desa). Dengan adanya elite lokal ini, membuat desa berkesempatan untuk menyediakan kredit, membuka UKM lokal bahkan membuat komunitas lokal untuk mengamankan desa.

eksplanatif karena penulis ingin menggambarkan karakteristik seorang elite dan juga paguyuban lokal serta menjelaskan hubungan antara peran elite dengan Paguyuban Padang Sambian Bersatu. Melalui pendekatan ini diharapkan mampu menjaring realita data berdasarkan pada pengamatan di lapangan oleh penulis dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang disekitaran Desa Pakraman Padang Sambian.

Penelitian ini berlokasi di Desa Padang Sambian, Kecamatan Denpasar Barat Provinsi Bali. Alasan penulis mengambil lokasi penelitian di desa ini karena Desa

Padang Sambian tepatnya di daerah Desa Pakraman Padang Sambian merupakan markas besar dari Paguyuban Padang Sambian Bersatu serta GC adalah elite politik tinggal menetap dan ikut andil dalam memberikan kebijakan di paguyuban dan desa ini. Di sisi lain daerah yang menjadi objek penelitian termasuk daerah yang dekat dengan asal penulis. Sebagai mahasiswa sosial politik, melakukan penelitian yang ada di daerah sekitar penulis merupakan suatu kebanggaan dan sangat etis terjadi. Penulis harapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangsih terutama dalam mewujudkan pendidikan politik yang maju dan berkesan di daerah ini. Secara keseluruhan semua kegiatan dilakukan selama kurang lebih 8 bulan, yaitu sejak bulan Desember 2018 sampai Juli 2019.

Data merupakan sumber informasi yang didapatkan penulis melalui penelitian yang dilakukan. Data merupakan keterangan-keterangan tentang suatu hal, dapat berupa sesuatu hal yang diketahui atau yang dianggap atau anggapan. Atau suatu fakta yang digambarkan lewat angka, simbol, kode, dan lain-lain (Iqbal,2002). Data yang diperoleh nantinya akan diolah

sehingga menjadi informasi baru yang dapat dimanfaatkan pembaca. Dalam penelitian ini, data diperoleh dari dua sumber, yaitu data primer dan data sekunder.

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber pertama melalui prosedur dan teknik pengambilan data yang dapat berupa wawancara, observasi, maupun penggunaan instrumen pengukuran yang khusus dirancang sesuai dengan tujuannya (Saifuddin,2005:36). Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui wawancara terhadap para informan yang relevan dan terkait dengan penelitian ini, sedangkan para narasumbernya sudah ditentukan dan dipilih oleh peneliti dengan menggunakan skala prioritas. Adapun data yang ingin dikumpulkan dari para informan penelitian ini terkait dengan peran elite GC dalam Padang Sambian Bersatu di Desa Pakraman Padang Sambian.

Penelitian ini mengambil beberapa infroman penting yang mengetahui persoalan terkait skripsi penulis, antara lain : Bendesa adat Padang Sambian sebagai petinggi atau orang nomor satu di desa pakraman Padang Sambian yang mengetahui segala urusan tentang adat

dan masyarakat desanya. Pengurus Paguyuban Padang Sambian Bersatu memiliki manajemen nya tersendiri termasuk dalam hal ketua dan keanggotaan. Dalam penelitian ini penulis memilih bertemu langsung dengan Ketua Paguyuban Padang Sambian Bersatu Serta beberapa anggota yang termasuk di dalamnya yakni wakil ketua paguyuban. Kantor kelurahan Desa Padang Sambian melayani masyarakat dalam memenuhi kebutuhan administrasi kependudukan termasuk perizinan-perizinan. Penulis ingin mendapatkan informasi terkait keterlibatan desa dinas di Desa Padang Sambian dalam menerima peranan elite dan paguyuban lokal. Masyarakat yang penulis pilih merupakan masyarakat asli dan pendatang di desa pakraman Padang Sambian yang merasakan dampak langsung dari kegiatan elite GC dan Paguyuban Padang Sambian Bersatu.

4. HASIL PEMBAHASAN

Keterlibatan GC dalam Paguyuban Padang Sambian Bersatu sangat signifikan. Hal ini tidak hanya karena perannya sebagai ketua paguyuban, namun yang penulis temui di lapangan bahwa GC menggunakan dukungan dari paguyuban untuk mendapatkan kedudukan tertentu. Pada bab sebelumnya, Suzanne Keller

dalam Teori Elite mengungkap bahwa elite tradisional adalah mereka yang mampu melakukan adaptasi dengan situasi modern. Sebagai seorang balian, GC mampu bertahan dengan perubahan situasi kondisi di lingkungan sekitarnya. Namanya masih tetap eksis sebagai seorang elite tradisional yang memiliki kemampuan dalam mengobati, namun GC merasa tidak ingin dikenal sebagai balian karena eksistensinya sebagai balian menurutnya bisa menjadi sebuah serangan bagi lawan-lawan politiknya.

Walau begitu ketika situasi modern yang di pengaruhi oleh kepentingan politik, latar belakang sebagai seorang balian, tidak menggangukannya untuk mendapatkan jabatan di politik. Melalui peranan ini, penulis mendapatkan temuan baru bahwa elite dalam tingkatan tradisional masih tetap bisa terlibat dengan konflik terhadap situasi di sekitarnya. GC mencapai kedudukan sebagai elite politik lokal sebelumnya juga karena kedudukannya sebagai elite tradisional dan elite lokal. Dalam kategori ini bisa dikaitkan bahwa hal tersebut adalah bagian dari elite non-politik lokal. GC dalam peranannya menggunakan dua ruang lingkup tersebut sehingga timbul konflik yang terjadi antar elite politik serta elite lokal masyarakat salah satunya dengan Bendesa Adat. Konflik elite dapat dipahami dari berbagai dimensi untuk melihat faktor penyebab, motif dan kepentingan politiknya. Pengertian konflik di sini merujuk pada hubungan antarkekuatan politik yang memiliki, atau merasa memiliki, sasaran-sasaran yang tidak sejalan. GC

yang menggunakan jabatannya untuk memilih Bendesa Adat yang bukan dari kalangan politik dengan harapan merasa bahwa sasaran kepentingannya bisa terlaksana dengan mudah. Namun di lain pihak Bendesa Adat yang menjabat saat ini memiliki perbedaan sasaran kepentingan dengan GC. Konflik politik sebenarnya juga sudah terjadi ketika dalam proses pemilihan Bendesa juga turut di pengaruhi oleh kepentingan perbedaan partai politik. Hal ini tidak lepas karena pengaruh multikultur masyarakat Desa *Pakraman* Padang Sambian yang sudah penulis bahas dalam bab sebelumnya sehingga perbedaan identitas politik juga ikut mempengaruhi dalam konflik elite ini.

Adanya konflik dengan berbagai karakteristik, seorang elite menurut Suzanne Keller memiliki kemampuan untuk mengakhiri konflik yang terjadi. Bagaimanapun karakteristik konfliknya, kecenderungan terjadinya integrasi dalam rangka mengakhiri konflik pasti terjadi. Oleh karena itu, gagasan konsep mengenai sistem politik demokrasi juga bisa digunakan dalam upaya penyelesaian konflik di tingkat lokal. Sistem politik yang menerapkan pembagian kekuasaan, mengidealkan keputusan politik bila terjadi suatu konflik akan mengarah pada berbagai koalisi untuk mengakhiri pertentangan dengan cara mekanisme pembagian kekuasaan agar tidak terjadi power yang berlebihan di tingkat lokal. Melihat pada kasus GC pada hasil temuan sebelumnya menjelaskan bahwa kekuasaan yang dimilikinya berada pada tiga tingkatan elite,

yakni tradisional, lokal dan politik. Solusi mengenai sistem politik demokrasi inilah yang harus di aplikasikan agar kekuasaan GC tidak bertumpu pada satu kepentingan saja.

Walaupun GC dianggap sebagai tokoh yang sangat di homati di kalangan masyarakat desa *pakraman*, ada saja pihak-pihak yang menentang kebijakannya. Pada bab sebelumnya Keller juga menyebut bahwa elite dalam masyarakat (lokal) memiliki kemampuan untuk melakukan mediasi antara individu satu dengan kelompok atau sebaliknya. Pernyataan ini sesuai ketika dalam kasus mediasi bersama ormas Laskar Bali, GC mengambil keputusan untuk melakukan mediasi tersebut. Namun tidak diberikan penjelasan mengenai dampak dari mediasi tersebut seperti apa. Kenyataannya yang penulis temui di lapangan, mediasi yang dilakukan oleh oknum elite berpengaruh besar terhadap citra elite tersebut. Bahkan jika dengan momen yang sesuai, elite bisa mendapatkan dukungan penuh. Di sisi lain elite juga mulai memelihara dukungan tersebut sehingga sampailah elite pada tujuan kepentingan yang diinginkan. Oleh karena itu agar suatu sistem politik tidak terjadi pergesekan dengan pusat, penulis rasa penting untuk daerah lokal dalam hal pembagian kekuasaan tetap pada sistem politik demokrasi.

Dalam menuju sebuah kepentingan di jabatan politik, GC tidak lepas dari dukungan Paguyuban Padang Sambian Bersatu yang dianggap memiliki sikap dan rasa fanatik terhadap dirinya. Adanya

dukungan ini juga tidak lepas dari perubahan politik yang terjadi di masyarakat. Dukungan yang GC dapatkan dalam sebagai elite, merupakan sebuah kemampuan yang dimiliki sebagai seorang elite politik. Paguyuban Padang Sambian Bersatu merupakan bagian dari masyarakat Desa *Pakraman* Padang Sambian yang fungsinya menjalankan tugas di bawah perintah desa. Namun paguyuban ini secara tidak langsung juga menjadi sebuah massa pendukung dari GC untuk mencapai dan mempertahankan kepentingannya.

Pada hasil temuan, Paguyuban Padang Sambian Bersatu yang hingga saat ini bertugas mengambil retribusi parkir terhadap para pedagang masih menggunakan karcis retribusi di tahun 2005. Namun tidak dilakukan tindakan pengelolaan yang baik menginta Bendesa Adat sebelumnya merupakan kerabat dekat dai ketua paguyuban. Begitu halnya dari pihak paguyuban yang merasa aman walau tetap memakai karcis tersebut. Peran dari GC tentu tidak bisa dilepaskan dalam kasus ini, dalam konteks mengatur massa tentu elite membutuhkan dukungan serta kepercayaan dari massa pendukungnya. Oleh karena itu, GC seolah membiarkan hal ini terjadi agar nantinya dari Paguyuban Padang Sambian Bersatu bisa dimobilisasi untuk tujuan-tujuan tertentu untuk kepentingan elitennya. Rasa percaya massa Paguyuban terhadap GC juga sangat besar selain melihat sosok GC, ada juga kepentingan yang ingin diterapkan oleh massa pendukung dengan melibatkan nama desa *pakraman* hingga sampailah ke

dalam jalinan kerja sama dengan pihak kepolisian yang menurut penulis merupakan bagian dari strategi paguyuban agar bisa bertahan di kepentingan tingkat lokal.

Berdasarkan analisis penulis diatas, keterkaitan bahwa teori Elite dari Suzanne Keller yang penulis jabarkan ke dalam tiga pemikiran terkait tradisional, elite dan politik mampu membingkai permasalahan yang terjadi pada GC dan Paguyuban Padang Sambian Bersatu. Walau GC merupakan bagian dari darah bangsawan, namun tidak semua bangsawan bisa dikategorikan elite tradisional. Seorang elite tradisional harus memiliki kemampuan yang diakui oleh masyarakat sehingga tidak sebatas berdasarkan keturunan saja. Sama juga mengenai elite lokal, ketika menjabat menjadi wakil bendesa adat, GC kemudian mendapatkan kedudukan menjadi elite politik. Hal ini bukan berarti bahwa semua yang memegang peranan adat, memiliki peluang besar untuk masuk ke politik. Kenyataannya yang dibutuhkan adalah massa pendukung yang fanatik serta keberadaan partai politik yang memenuhi ambang batas parlemen. Walaupun seperti itu, penulis tetap berkeyakinan bahwa teori elite ini cocok diterapkan dalam situasi membahas lokal dan adat seperti di Desa *Pakraman* Padang Sambian. Namun masih ada beberapa penyesuaian yang menyangkut perilaku massa dan solusi yang harus diberikan terhadap kekuasaan dari Cus Cilik.

5. KESIMPULAN

Pada bagian ini penulis akan mengemukakan kesimpulan guna menjawab pertanyaan penelitian yang tercantum pada rumusan masalah pada bab sebelumnya. Berdasarkan analisa penelitian ini, elite GC yang semula seorang Balian kemudian sangat berperan dalam Paguyuban Padang Sambian Bersatu. Peran yang GC mainkan sangat strategis dan mampu beradaptasi dengan berbagai kondisi jaman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, kuasa GC sebagai elite digunakan pada tiga titik yakni dalam tradisional, lokal dan politik. Sebagai elite tradisional, GC mampu mengarahkan basis kekuatan melalui pendukungnya untuk menjadikannya wakil bendesa, sedangkan dalam elite lokal (masyarakat) GC memelihara hubungannya dengan para masyarakat desa bahkan menunjukkan kuasanya melalui mediasi terhadap penyelesaian konflik agar tetap mendapat dukungan terbesar yakni dari adat serta paguyuban hingga menjadikannya Wakil Ketua DPRD Kota Denpasar. Selanjutnya sebagai elite politik, GC membangun hubungan-hubungan tidak hanya dengan pihak adat saja, namun juga dengan kepolisian serta menggunakan kuasanya untuk menentukan pemilihan kepala adat. Dalam kasus ini GC berperan menjamin hubungan yang kondusif antara paguyuban dan desa adat sehingga pihak kepolisian tetap mengizinkan Paguyuban Padang Sambian Bersatu untuk tetap ada hingga sekarang.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. (2006). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Bumi Aksara
- Azwar, Saifuddin. (2005). *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Iqbal, M. Hasan (2002). *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian & Aplikasinya*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Keller, Suzanne. (1963). *Penguasa dan Kelompok Elit, Peranan Elit Penentu dalam Masyarakat Modern*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Milles dan Huberman (1992). *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas
- Moleong, Lexy J. (2003). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Nordholt, Henk Schulte. (2010). *Bali Benteng Terbuka : Otonomi Daerah, Demokrasi Elektoral dan Identitas Defensif*. Denpasar : Putaka Larasan & KITLV Jakarta
- Roskin, Michael G. (2016). *Pengantar Ilmu Politik*. Jakarta : Kencana Media
- Smith, B.C (1985). *Decentralization; The Territorial Dimension of The State*. London: George Allen and Unwin.
- Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif Kualitatif dan R&D)*. Bandung : Alfabeta
- _____. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta
- Suryawan, Ngurah. (2010). *Genealogi Kekerasan dan Pergolakan Subaltern (Bara Di Bali Utara)*. Jakarta : Prenadamedia Group
- Varma, S.P. (2010). *Teori Politik Modern*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Suparman, I Made. (2019). *Selayang Pandang Desa Pakraman Padang Sambian*. Denpasar : Kantor Desa Pakraman Padang Sambian

